MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/51/M.RB.06/2017
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

16 Februari 2017

Yth. **Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat**
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen MPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI adalah **46,67** dengan kategori "**C**" terinci sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016
A	**Pengungkit**			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,58	3,53
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,84	3,68
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,59	3,04
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,73	11,65
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,73	0,92
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,92	3,66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,75	2,83
	Sub Total Komponen Pengungkit	**60,00**	**30,23**	**31,40**

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016
B	**Hasil**			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,74	12,27
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,36	3,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,75	0,00
	Sub Total Komponen Hasil	**40,00**	**29,85**	**15,27**
	Indeks Reformasi Birokrasi	**100,00**	**60,07**	**46,67**

2. Indeks Reformasi birokrasi Setjen MPR sebesar 46,67 merupakan capaian dari 83% dari keseluruhan nilai Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan Setjen MPR tidak melakukan penilaian survey eksternal atas kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Survey eksternal tidak dapat dilakukan karena Setjen MPR mengalami kendala dalam mengumpulkan stakeholder sebagai responden untuk survey-survey tersebut.

3. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI selama tahun 2016, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti:

   a. Penggunaan *e-government* telah dilakukan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan.

   b. Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang disusun telah memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama organisasi.

   c. Telah melakukan upaya penyempurnaan organisasi agar lebih fleksibel dalam pengelolaan Setjen MPR RI selaras dengan prioritas pembangunan nasional;

   d. Telah memiliki kebijakan promosi terbuka dan melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama secara nasional.

4. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,23 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks
1.	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	3,17
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,12
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,25
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,36

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Setjen MPR RI terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Indeks integritas ideal sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 adalah 3,6.

5. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Setjen MPR RI, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

   a. Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik dan terukur untuk setiap area perubahan yang akan dicapai.
   b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing-masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan reformasi birokrasi di setiap area perubahan;
   c. Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu pegawai
   d. Menyusun dan menyempurnakan peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama Setjen MPR RI serta melakukan reviu secara berkala terhadap standar operasional yang telah ditetapkan;
   e. Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik.
   f. Menyusun Rencana Redisitribusi pegawai dan diformalkan.
   g. Menyusun dan membuat Proyeksi kebutuhan 5 tahun pegawai dan diformalkan.
   h. Melakukan indentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh.
   i. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
   j. Membuat kebijakan promosi terbuka dan diformalkan.
   k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran secara berkala terhadap pegawai yang telah menetapkan target kinerja individu dan mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan kompetensi serta remunerasi yang diterima;
   l. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system* penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut
   m. Mendorong penerapan zona integritas di lingkungan Setjen MPR RI yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
   n. Menyusun suatu pedoman penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong penguatan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara;
   o. Reviu atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut.
   p. Melakukan survey atas kepuasan pelayanan yang hasilnya dapat diakses secara terbuka dan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peninkatan pemberian pelayanan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI. Kami menghargai upaya Sekretaris Jenderal MPR RI beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Setjen MPR RI.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Asman Abnur

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.